

PERANAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)

Mardi Liunsanda¹

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya.

Kata Kunci : Peranan, Perangkat Desa, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

Pendahuluan

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan, sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pembangunan yang terminologis dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang dapat meletakkannya, artinya sebagai salah satu dasar untuk menuju arah perbaikan kehidupan, walaupun secara fisik sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan lain sebagainya. Namun pemahaman demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya, karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan yang diasumsikan semula sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah seperti yang sudah disebutkan diatas dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahannya diatas, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Kepala Desa dan Perangkat Desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu

menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Dengan sumber dana yang melimpah, seharusnya desa mampu melaksanakan program pembangunan dengan baik, namun keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya terletak pada jumlah anggaran yang dikucurkan, namun sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksana, dalam penelitian ini perangkat desa sebagai pengelola, penggerak partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kembes II Kecamatan Tombulu? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran

“an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi seseorang/lembaga. Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (suryono soekanto, 1987:220). Suatu peranan menurut Levison, (1994 : 204) mungkin mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata

cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut S P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ nation building. Sementara Riyono Pratikno (1979:119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup. Lebih lanjut Bintoro (1991:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun

sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- c. Berlangsung terus-menerus.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna,1991 :32). Fokus penelitian ini adalah peranan perangkat desa dalam proses pembangunan desa yaitu dalam proses perencanaan, proses pencapaian tujuan, proses pengambilan keputusan serta proses evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan

kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan purposive sampling ini memberi kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan substansi permasalahan. Sampling yang dimaksudkan bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi informasi. Pemilihan sampel tidak berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan sesuai dengan substansi penelitian.

Hasil Penelitian

Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan Desa, yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. kemudian dibantu oleh Perangkat Desa.

Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat dalam bidang wirausaha

mengingat wilayah di Desa Kembes II adalah berpotensi di bidang wirausaha dan perdagangan yang merupakan lalu lintas antara Kota Manado menuju Tondano dan letak dari desa Kembes II berdekatan dengan Ibukota Provinsi sehingga masyarakat di sini terutama pemuda yang banyak mengadopsi gaya hidup mewah di perkotaan dan malas bekerja kasar. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Kembes II Albert Kindangen, mengatakan: “Masyarakat di sini banyak yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan pegawai bahkan usia pemuda pun banyak melakoni profesi ini. Sehingga minat di sektor ini merupakan hal yang patut didukung sebagai fokus pembangunan khususnya pembangunan non fisik di Desa Kembes II ini. Pembangunan bukan hanya dari segi fisik saja, pembangunan non fisik pun sangat penting yang saya maksudkan di sini contohnya saja bagaimana selalu memberi pelayanan semaksimal mungkin dalam kelengkapan administrasi dalam kelengkapan berwirausaha. Apalagi sekarang ini di galakkan penyuluhan dan pelatihan berwirausaha di Desa di mana sasarannya adalah pemuda dan ibu rumah tangga yaitu dalam bentuk pelatihan kursus menjahit dengan mendatangkan instruktur dari tingkat kabupaten dan provinsi”. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Kembes II, Bonifasius Runtuwene: “Saya bersyukur dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat di Desa Kembes II dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan sehingga dapat memberi bekal keterampilan kepada pemuda dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan lain, walaupun ini merupakan bentuk dari Dana Desa dan memang ada andil

permintaan dari warga sendiri.” Kemudian ditambahkan lagi oleh bapak Krostofel seorang wiraswasta sekaligus Tokoh Masyarakat Kembes II bahwa “untuk masalah pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat semua aparat Desa mengobservasi kebutuhan warga dan diadakanlah pelatihan yang dimaksud dan berusaha mensosialisasikan agar banyak warga yang ikut menghadiri.”

Sesuai dengan pengamatan penulis dari hasil observasi pada saat kunjungan ke lokasi-lokasi lingkungan yang ada di Desa Kembes II terlihat adanya kunjungan dalam keadaan santai oleh Kepala Lingkungan yang didampingi oleh seorang aparat Desa. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan menurut Kartasamita (1996: 33) adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.”

Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Just Kindangan ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kembes II mengatakan “Menurut saya, kami sebagai mitra kerja Kepala Desa dan aparat Desa melihat adanya upaya pihak Desa dalam mempengaruhi masyarakat sudah cukup baik, sehingga warga masyarakat banyak yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan. Hal ini akan berdampak positif bagi pemuda dan ibu rumah tangga yang mengikuti dan dapat mendapatkan tambahan keterampilan dan kreativitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.” Dari

pernyataan-pernyataan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Perangkat Desa dan Kepala Desa Kembes II benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Kepala Desa dan Perangkatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain ; meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor Desa. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan.

Perangkat Desa dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala Desa pun selalu bersikap transparan baik masalah pembangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan Desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat Desa bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan selalu hadir di kantor Desa Kembes II, kemudian informasi disosialisasikan kesemua warga. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan

kepada warga, itu akan akan cepat diserap oleh warga baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di mesjid yang diupayakan oleh kepala lingkungan. Untuk masalah pengambilan keputusan sendiri, Kepala Desa selalu memperhatikan aspirasi dari semua kepala lingkungan dan ketua lembaga kemasyarakatan, ini bisa dianggap keterwakilan dari warga masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Bernardus Lumi selaku Anggota BPD Desa Kembes II bahwa “Dalam setiap pengambilan keputusan, Kepala Desa tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, ia selalu merundingkan dengan aparat lainnya, kepala lingkungan, dan ketua lembaga kemasyarakatan. Beliau pun tidak segan-segan untuk meminta saran dan pendapat dari kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kembes II dalam proses pelaksanaan pembangunan non fisik dengan cara selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap ada kegiatan dan pengambilan keputusan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Desa Kembes II rasa kekeluargaan dan jiwa kebersamaannya masih erat terjalin walaupun Desa Kembes II merupakan daerah yang latah akan perkembangan di zaman yang telah maju ini. Agar peranan Pemerintah Desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya sebagai pembina, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagai berikut.

Kegiatan memberi contoh atau lebih dikenal dengan keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan tugas bawahan/orang yang dipimpin sehingga

dapat mengikuti apa yang dikehendaknya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Aktivitas untuk memberi tuntutan/pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan baik itu untuk perangkat Desa maupun untuk masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat Desa atau masyarakatnya itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak Kepala Desa. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988:110). Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha (2003:24) mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Dalam kaitannya dengan

pembinaan masyarakat Desa, kepala Desa selaku pemimpin di Desa Kembes II yang didominasi oleh petani. Mengingat kondisi Desa Kembes II yang merupakan sektor perekonomian dan pertanian maka upaya pihak pemerintah Desa hanya bergelut di bidang pertanian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini senada yang diungkapkan oleh bapak Yance Mantiri salah satu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta bahwa :

“Masyarakat di sini pada umumnya suka mengikuti gaya hidup orang kota dan memang di sini bukan lagi desa, rata-rata masyarakat senang berbisnis dan orang yang berjiwa muda sangat jarang mau bekerja di kebun dan di sawah. Jadi cocokmi langkah yang diambil oleh Kepala Desa yaitu dengan memberikan pelatihan untuk warga yang tidak memiliki kesibukan seperti sekarang saya lihat ada pelatihan menjahit di kantor Desa, meskipun begitu masih juga masyarakat yang berpekerjaan petani”

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai peranan pemerintah Desa dalam pembangunan dan peran pemerintah Desa sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan.

Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kinerja aparat Desa dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peranan pemerintah Desa dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan

masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan. Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila para Perangkat Desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Just Kindangen, yakni “Kondisi penduduk Desa Kembes II yang cukup beragam ini harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya. Macam kalau warga berprofesi sebagai pebisnis yang serba sibuk dengan urusan bisnisnya tentu maunya tau beres saja dengan urusan Desa dan sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya secara langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di Desa tapi mereka siap memberi bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupun kalau warga adalah seorang petani dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka

semua siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah.” Sesuai dengan pengamatan penulis bahwa kondisi kesibukan akan profesi warga maka sangat jarang terlihat adanya partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Kendati demikian ternyata masih ada saja warga di sekitar lorong-lorong tertentu yang lokasinya agak jauh dari pusat Desa Kembes II atau pasar yang tetap berpartisipasi dalam berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Fasilitas seperti ini diadakan karena swadaya atau partisipasi dari warga yang dikordinir oleh Kepala Jaga setempat.

Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di kantor Desa maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Desa Kembes II. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Kepala Desa Kembes II Partisipasi masyarakat merupakan hal sangat penting, jadi saya berharap semua Perangkat Desa tetap

meningkatkan dan buka peluang sebaik-baiknya buat warga agar tetap berpartisipasi dalam pembangunan demi perkembangan daerah. Saya lihat Perangkat Desa saat ini selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi baru-baru ini diadakan musrenbang tingkat Desa dan itu tetap hadir tokoh masyarakat dari berbagai Desa dan desa. Musyawarah ini merupakan keharusan yang tidak bisa tidak diadakan, karena ini adalah merupakan program nasional yang harus melalui mekanisme bertingkat. Kami sebagai aparat hanya menjalankan aturan yang diberlakukan. Bahkan dari musyawarah ini terlihat adanya pertarungan prioritas kebutuhan.” Partisipasi secara etimologi mengandung pengertian adanya keterlibatan diri dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam kamus administrasi yang menyatakan bahwa partisipasi adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka partisipasi adalah hal ikutnya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Sebagai aparat pemerintah Desa harus bisa berupaya membuat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan tantangan besar yang pernah dialami oleh pemerintah Desa Kembes II karena masyarakat yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menyelesaikan bisnis masing-masing. Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali informasi dari lokasi Desa Kembes II maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik

ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Kembes II, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan di tingkat Desa.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya.

Untuk lebih lanjutnya peranan pemerintah Desa dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni :

- a. Peranan Perangkat Desa sebagai pembina : Pemerintah Desa sebagai pembina masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Kembes II adalah basis perekonomian yang banyak di bidang perdagangan. Hal ini mengakibatkan perekonomian

Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera.

- b. Peranan Perangkat Desa sebagai pelayan masyarakat : Dalam melayani masyarakat pemerintah Desa bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kembes II dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan waktu lama yang biasa merugikan. Serta bagaimana Kepala Desa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan lainnya yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II terdiri dari :
 1. Partisipasi masyarakat
Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali informasi dari lokasi Desa Kembes II maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Kembes II, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung peranan pemerintah Desa dalam pembangunan.
 2. Kerjasama antar sesama aparat

Kerjasama antara aparat pemerintah Desa Kembes II ini tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan yang sangat harmonis antara sesama aparat Desa, berupa keakraban yang terjadi antar sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap Kepala Desa. Kesemua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan maksimal demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.

3. Kurangnya sarana dan prasarana
Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Dari sini dapat dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan menghambat perkembangan pembangunan di Desa Kembes II.

4. Kualitas sumber daya aparat
Kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Kembes II terbilang masih rendah. Terlihat dengan masih banyaknya aparat pemerintah Desa Kembes II yang hanya tamatan SMA dan hal tersebut membuat Kepala Desa selalu memotivasi aparatnya agar melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian mengenai tingkat keterampilan (skill) juga masih relatif rendah, masih banyak aparat yang belumbisa mengoperasikan teknologi komputer yang tentu saja dapat menghambat pelayanan di bidang administrasi. Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang berdampak tidak efisiennya pembangunan di Desa Kembes II. Dan hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya aparat Pemerintah di Desa Kembes II.

Saran

1. Peningkatan peranan Perangkat Desa Kembes II dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kembes II harus dioptimalkan lagi dengan berupaya semaksimalnya untuk merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi, di mana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Kembes II.
2. Kepada Kepala Desa agar kiranya tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Dan untuk aparat pemerintah Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Agar kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Kembes II yang masih tamatan SMA agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mengupayakan penguasaan keterampilan (skill) yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

Hoogerwerf, A., 1983, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.
Ibnu Syamsi, 1986. Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah, Rajawali Jakarta.
Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-prinsip Pembuatan Kebijakan Negara, Aksara Baru, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.
Pratikno, Riyono, Komunikasi dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1979.

Poewadarminta, W.J.S., 197. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1985 Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

Sadu Wasistiono, 2007 Prospek Pengembangan Desa, CV. Fokusmedia Bandung.

Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung.

Soekanto Suryono, 1997, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia

S.P.Siagian, Administrasi Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1991.

Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.